

ABSTRAK

Di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi memainkan peran strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayahnya. Sebagai perpanjangan dari BNN pusat, BNNP Jambi bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi Jambi dan kendala serta upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bentuk penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mencakup langkah preventif, represif, dan rehabilitatif, dengan fokus utama pada upaya preventif. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menghadapi tiga kendala utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan sejumlah upaya, antara lain memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai, memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, serta melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Narkotika, BNN Provinsi Jambi

ABSTRACT

In Indonesia, narcotics crimes are classified as extraordinary crimes. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is the main legal basis for combating narcotics crimes in Indonesia. The Jambi Provincial National Narcotics Agency (BNNP) plays a strategic role in efforts to combat narcotics crimes in its territory. As an extension of the central BNN, the Jambi BNNP is responsible for implementing national policies in the field of prevention, eradication, and rehabilitation of narcotics abuse and illicit trafficking. The purpose of this study is to determine and analyze the form of narcotics crime prevention carried out by the National Narcotics Agency in Jambi Province and the obstacles and efforts in combating narcotics crimes by the Jambi Provincial National Narcotics Agency. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was conducted through interviews. From the results of this study, it can be concluded that the form of drug crime prevention carried out by the Jambi Province National Narcotics Agency includes preventive, repressive, and rehabilitative measures, with the main focus on preventive efforts. In carrying out its duties, the Jambi Province National Narcotics Agency faces three main obstacles, namely limited human resources, limited facilities and infrastructure, and low public awareness. To overcome these obstacles, the Jambi Province National Narcotics Agency has undertaken a number of efforts, including providing training and capacity building for employees, strengthening coordination with various related agencies, and carrying out intensive counseling and outreach.

Keywords: Prevention, Narcotics Crimes, Jambi Province BNN